

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kinerja pemerintah semakin diwajibkan guna dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Memberdayakan desakan itu mewajibkan badan pemerintahan untuk membagikan berita dari kegiatan serta performa untuk umum (Soimah. 2014). Rakyat sebagai pemilik dana untuk menjalankan kegiatan sektor publik, maka sewajarnya rakyat memiliki hak untuk mengetahui kinerja pemerintah. Hal tersebut dapat diketahui oleh rakyat melalui laporan keuangan yang sebaiknya mudah diakses. Akuntansi sektor publik pada pelaporannya sangat ditekankan memiliki akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah didasari oleh Perundang-undangan No 17 Tahun 2003 mengenai Pendanaan di sebuah Negara bahwanya Wali Kota, Gubernur, ataupun Bupati menjabarkan terkait pengimplementasian APBD kepada DPRD berwujud informasi financial guna mewajibkan wujud serta inti report pengambil alihan implementasi Finansial Pemasukan serta Pemasukan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Belanja di wilayah yang dirancang serta ditampilkan menggunakan standarisasi keuangan pemerintahan dan sudah diatur dari aturan pemerintahan. Perubahan akuntansi ataupun pertanggungjawaban pemerintahan di daerah melalui pertanggungjawaban vertikal (guna pemerintah dipusat) kepada

pertanggungjawaban yang lurus (untuk rakyat dari DPRD) pada Aturan Nomor. 33 tahun 2004.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang kemudian BPK akan memberikan opini, terdapat empat macam opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Berdasarkan data BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdapat 36 entitas. Hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK tahun 2012 yang sebelumnya 11 entitas memperoleh opini WTP tiap tahunnya meningkat hingga pada tahun 2016 entitas yang memperoleh opini WTP mencapai 31 entitas. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya sebanyak 21 menjadi 31 entitas yang mendapatkan LKPD beropini WTP. Adapun grafiknya sebagai berikut :



Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Jateng

Gambar 1.1

Opini pemeriksaan LKPD

Fenomena yang terjadi baru ini BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan anggaran 2016 Kota Semarang kepada Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Penyerahan laporan dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang, Rabu (7/6/2017). Badan Pemeriksa Keuangan telah membagikan pendapat Normal minus pengurangan dari Informasi Finansial Kepemerintahan wilayah Kota Semarang tahun anggaran 2016 (Kompas.com). Adapun pada tahun 2012 LKPD Kota Semarang sempat mendapatkan opini WTP dari BPK, sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 kembali mendapatkan opini WDP.

Ketidak stabilan LKPD Kota Semarang dalam memperoleh opini membutuhkan pengkajian, agar memperoleh informasi finansial yang memiliki kualitas tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan cocok serta mengerti peraturan perancangan informasi finansial dari normalnya akuntansi pemerintahan.

Kualitas pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah menentukan tingginya tingkatan informasi finansial pemerintah di daerah. Sistem Pengaturan Intern Keemerintahan (SPIP) diatur dalam Keperaturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi derajat informasi finansial pemerintahan di daerah yaitu apresiasi sistem akuntan pemerintahan bersumber nyata. Definisi pengertian nyata yaitu apresiasi bagian ataupun karyawan mengenai peraturan, peraturan serta aturan tentang perda. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait

dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Apabila pemahaman regulasi atas Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Kualitas laporan keuangan yang disajikan dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat pemahaman regulasi.

Pemanfaatan di bidang informatika akan memberikan pengaruh untuk tingkat laporan finansial kepemerintah. Untuk memunculkan konsep etika dan keterbukaan dalam pengolahan pendanaan di daerah, implementasi di bidang informatika adalah merupakan kebutuhan pokok, agar dapat memaksimalkan dalam pengolahan data yang lebih efektif. Tuntutan implementasi informatika kepada pemerintahan utama serta Pemerintahan Wilayah dirancang untuk mengikuti aturan Pemerintahan No 56 Tahun 2005. Dalam peraturan pemerintah tersebut, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan SIKD dapat mempercepat

proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kiranayanti (2016) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kemudian didukung oleh Diani (2014) menemukan pemahaman akuntansi dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman, sedangkan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman.

Harnoni (2016) berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil pengujian variabel teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Komarasari (2017) berdasarkan hasil analisis kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat hasil penelitian positif atau negatif dan beda di beberapa niali yang mempengaruhi tingkatan niali finansial dari penelitian-penelitian terdahulu, perselisihan niali observasi tersebut sangat bagus guna dianalisa kembali terkait penyebab-penyebab yang dapat meberikan pengaruh tingkatan catatan finansial pemerintahan didaerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemilihan OPD Kota Semarang sebagai objek penelitian karena terjadi ketidak stabilan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memperoleh opini atas LKPD dari BPK seperti yang sudah dijelaskan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Fungsi catatan financial pemerintahan sangatlah penting. Beberapa contohnya adalah untuk beberapa tujuan untuk pemerintahan didaerah guna mengimplementasikan akuntansi finansialnya dan laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah. Laporan keuangan pemerintah juga wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang?
- 2) Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang?
- 3) Bagaimana pengaruh pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang?

- 4) Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang
- 4) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya akuntansi yaitu akuntansi sektor publik tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi pegawai OPD dan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Semarang terkait kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.4.2.2. Bagi Pengguna Yang Lain

Hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan ilmu akuntansi pada umumnya dan ilmu akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.